

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini didasarkan pada fenomena pencalonan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan Walikota Surakarta tahun 2020. Pemilihan walikota Surakarta termasuk kedalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota (Aida, 2020). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/ 2020 menyebutkan bahwa pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan pada 9 Desember tahun 2020.

Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari Joko Widodo, presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 (Saputra, 2021). Lebih daripada itu, Gibran Rakabuming Raka juga merupakan salah satu calon pada pemilihan walikota Surakarta tahun 2020 berpasangan dengan Teguh Prakosa. Gibran Rakabuming Raka maju pada pemilihan walikota Surakarta 2020 setelah mendapat rekomendasi pencalonan dari PDI-P. Rekomendasi tersebut diumumkan oleh ketua DPP

PDI-P Puan Maharani yang disiarkan langsung secara virtual di Panti Marhaen Semarang (Farasonalia, 2020). Kemudian penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh KPU Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penetapan pasangan calon tersebut sesuai dengan Nomor: 77/PL.02.3-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2020 (Zamani, 2020b).

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Walikota Surakarta menimbulkan permasalahan di Internal PDI-P. Hal ini karena DPC PDI-P Kota Surakarta terlebih dahulu merekomendasikan Achmad Purnomo untuk menjadi calon Walikota. FX Hadi Rudyatmo sebagai Ketua DPC PDI-P Surakarta mendorong DPP PDI-P mencalonkan Achmad Purnomo sebagai calon WaliKota Surakarta di Pilkada Serentak 2020. DPC PDI-P Kota Surakarta memasangkan Achmad Purnomo dengan Teguh Prakosa melalui penjaringan internal partai (CNNIndonesia, 2020).

Namun diwaktu pengumuman, DPP PDI-P mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepada Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka memang mendaftarkan diri menjadi bakal calon walikota Surakarta melalui DPD PDI-P Jawa Tengah setelah tidak bisa mendaftar lewat DPC PDI-P Kota Surakarta. Ditemani keluarga dan relawan, Gibran Rakabuming Raka mendaftarkan diri pada hari Kamis (12/12/19) jam

12.00 WIB. Gibran Rakabuming Raka diterima oleh Bagina, ketua tim pendaftaran calon Bupati dan Walikota di DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah (Wahyu, 2019).

Hasil rekomendasi DPP PDI-P membuat beberapa pihak di internal partai merasa kecewa. Achamad Purnomo yang merupakan kader senior sekaligus calon yang di rekomendasikan oleh DPC PDIP Kota Surakarta salah satu pihak yang kecewa. Dikutip dari berita online dari liputan6.com, Achmad Purnomo mengatakan "*Kecewa, jelas, sebagai manusia lumrah ya, tapi tidak berkelanjutan. Dari awal mempunyai harapan sebagai manusia tapi tidak berkelanjutan karena saya secara pribadi menilai bakalnya ya itu (Gibran)*". Achmad Purnomo juga telah memprediksi bahwa rekomendasi yang keluar dari DPP PDI-P akan kepada Gibran Rakabuming Raka, karena statusnya yang anak presiden Joko Widodo (Flora, 2020).

Lebih daripada itu, pihak yang kecewa dengan hasil rekomendasi calon walikota Surakarta 2020 juga dari DPC PDIP-P kota Surakarta. Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengakui dia dan banyak kader di Surakarta kecewa dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Kekecewan itu disebabkan calon yang mereka dukung Achmad Purnomo tergeser putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka di rekomendasi Pilkada Surakarta 2020 (Isnanto, 2020b). Kemudian FX Hadi

Rudyatmo juga menjelaskan bahwa DPP PDI-P melakukan kesalahan jika tetap merekomendasikan nama di luar yang diusulkan DPC. Hal ini karena DPP PDI-P akan melanggar aturan internal jika merekomendasikan nama di luar hasil penjangkaran. Aturan yang dimaksud ialah Peraturan PDI-P Nomor 24 Tahun 2017 tentang rekrutmen dan seleksi wali kota dan wakil wali kota. DPC PDI-P Kota Surakarta yang memperoleh suara minimal 25 persen dapat melakukan penjangkaran tertutup. FX Hadi Rudyatmo juga menyindir Gibran Rakabuming Raka yang memilih jalur 'bypass' langsung bertemu petinggi partai di tingkat DPP PDI-P (Isnanto, 2019).

Namun pernyataan yang berkaitan dengan DPP PDI-P melanggar aturan pencalonan di bantah oleh Wakil Sekertaris Jendral Arif Wibowo. Menurutnya DPC PDI-P Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan calon yang akan maju. Arif Wibowo menjelaskan mekanisme pemilihan pencalonan pemilihan kepala daerah 2020, Dewan Pimpinan Cabang berwenang menjaring kemudian Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat berwenang menyaring. Dewan Pimpinan Daerah kewenangannya menyaring hanya sebatas *fit and proper test*, keputusan final berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Arif Wibowo juga menjelaskan Dewan Pimpinan Pusat tidak melanggar aturan jika mengusung seseorang tanpa melalui proses penjangkaran atau di Dewan Pimpinan Cabang. Sebab, pintu mendaftar

pemilihan kepala daerah itu ada tiga yakni di Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat (Putri, 2019).

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa terjadi fragmentasi politik di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon walikota Surakarta. Fragmentasi politik adalah sebuah situasi yang mewakili diferensiasi atau perpecahan organisasi-partai dan afiliasi politik, individu, kelompok, dan kekuatan underbow yang terlibat di dalamnya, ideologi, motif dan faham politik, konteks ekonomi, sosial, dan budaya yang melatari, sampai dengan simbol dan atribut politik lainnya yang merepresentasikan identitas partisan politik. Kekuatan politik eksternal dari partai-partai politik secara keseluruhan dan fusi kekuasaan dari kepemimpinan partai kepada pemegang jabatan individu (Pildes, 2014). Tarik-menarik kepentingan di partai politik yang konfliktual berujung fragmentasi politik. Wujudnya tercermin pada organ partai politik induk, kemudian mengalami perpecahan menjadi sel-sel politik yang bersifat otonom. Fenomena fragmentasi politik adalah implikasi dari pelembagaan demokrasi dan manajemen konflik partai yang masih rapuh (Sadler & Highsmith, 2016).

Kemudian, menariknya penelitian ini dilakukan karena berkaitan dengan ekpektasi kader elite lokal PDI-P Kota Surakarta tidak di akomodir

oleh elite yang ada di pusat. Kader senior sekaligus petahana wakil walikota Surakarta periode 2013-2015 dan 2016-2021 yakni Achmad Purnomo yang direkomendasikan oleh DPC PDI-P Kota Surakarta, ternyata tidak mendapat rekomendasi pencalonan dari DPP dalam hal ini ketua umum Megawati Soekarnoputri. Disamping itu, PDI-P yang selama ini dikenal soliditas internal nya cukup baik ternyata tidak demikian. Sejarah panjang PDI-P telah mengalami konflik internal terutama pada awal tahun 2000 an. Konflik internal diawali dari tersingkirnya Dimiyati Hartono dan Eros Djarot sebagai kader PDI-P pada kongres I tahun 2000 karena di angap ingin menggeser Megawati Sukarnoputri. Kemudian tahun 2002 dimiyati Hartono membentuk Partai Indonesia Tanah Airku (PITA). Pembentukan PITA yang tidak efektif, membuat Eris Djarot membentuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) untuk bertarung pada pemilu 2004. Kemunculan dua partai yang dibentuk oleh mantan anggota PDI-P tersebut menjadi awal munculnya perpecahan akibat dari konflik internal di era reformasi (Faisol & Krisnadi, 2015).

Kekalahan PDI-P pada pemilu 2004 membuahkan sikap kritis di kalangan internal partai. Kwiek Kian Gire kemudian membentuk Gerakan Pemurnian, namun meski mendapat dukungan dari kalangan elit internal partai, gerakan tersebut berhenti ditengah jalan. Meski tidak ada hubungan dengan Gerakan Pemurnian, di tempat lain menjelang

pelaksanaan Kongres II di Bali tahun 2005 Arifin Panigoro membentuk Gerakan Pembaharuan PDI-P yang bertujuan untuk modernisasi partai. Namun gerakan ini gagal mengalahkan Megawati Sukarnoputri pada pemilihan ketua umum kongres II di Bali tahun 2005. Kegagalan gerakan pembaharuan ini di kongres II kemudian tidak menyurutkan langkahnya, konsolidasi yang dilakukan oleh para anggotanya menghasilkan kesepakatan untuk mendeklarasikan partai baru yang diberi nama Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) (Faisol & Krisnadi, 2015).

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak terlepas dari sejarah konflik di internalnya. Namun konflik tersebut terjadi antar para elite pusat untuk mendapatkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Maka penelitian ini lebih mengambil kasus pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Kota Surakarta, karena dalam kasus ini konflik yang terjadi melibatkan elite lokal dengan elite pusat. Pada kenyataannya elite lokal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surakarta menguat untuk tidak setuju dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon Walikota. Padahal Kota Surakarta merupakan kampung halaman dari presiden Joko Widodo yang notabene bapak dari Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam terkait **“Menguji Soliditas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**

pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Walikota Surakarta Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan masalah bahwa proses rekrutmen calon yang telah dilaksanakan oleh DPC PDI-P Kota Surakarta menghasilkan nama Achmad Purnomo sebagai kader yang direkomendasikan untuk diusung menjadi calon walikota Surakarta. Namun pada kenyataannya proses tersebut di “by pass” oleh Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak presiden Joko Widodo dan memiliki kedekatan yang kuat dengan DPP PD-P. Sehingga Gibran Rakabuming Raka mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI-P untuk menjadi calon Walikota Surakarta. Hal ini tak pelak membuat Achmad Purnomo selaku kader senior yang telah mendapatkan rekomendasi sebelumnya merasa kecewa. Lebih dari itu, DPC Kota Surakarta juga merasa kecewa karena proses yang dilaksanakan di tingkat cabang terlihat tidak dihargai DPP. Maka daris inilah penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana soliditas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ditengah fragmentasi politik internal pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan Walikota Surakarta tahun 2020.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji sejauh mana soliditas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ditengah fragmentasi politik internal pada proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka di pemilihan Walikota Surakarta tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan dan partai politik di Indonesia, khususnya tentang fragmentasi partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang bersinggungan dengan partai politik dan pemilihan kepala daerah untuk paham tentang fragmentasi politik pada proses pencalonan kepala daerah. Kemudian juga memahami tentang soliditas kelembagaan partai politik.